

# Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Digital pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam (*The Importance of Community Legal Awareness to Increase the Competitiveness of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the Digital Era in Sembulang Village, Rempang District, Galang Island, Batam City*)

Christiani Prasetyasari<sup>1\*</sup>, Nicha Suwalla<sup>2</sup>, Irpan Husein Lubis<sup>3</sup>, Annisa Rizky Andriani<sup>4</sup>, Annisa Delviane<sup>5</sup>, Citra Permata Sitohang<sup>6</sup>, Tania Puji Andriani<sup>7</sup>, Markis Markis<sup>8</sup>, Istighfari Istighfari<sup>9</sup>, Fernando Lumban Gaol<sup>10</sup>

Universitas Batam, Batam<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</sup>

[christiani@univbatam.ac.id](mailto:christiani@univbatam.ac.id)<sup>1\*</sup>, [nichasuwalla@univbatam.ac.id](mailto:nichasuwalla@univbatam.ac.id)<sup>2</sup>, [irpan@univbatam.ac.id](mailto:irpan@univbatam.ac.id)<sup>3</sup>, [nandotimothy82@gmail.com](mailto:nandotimothy82@gmail.com)<sup>4</sup>



## Riwayat Artikel

Diterima pada 28 Agustus 2023

Revisi 1 pada 2 September 2023

Revisi 2 pada 4 September 2023

Disetujui pada 6 September 2023

## Abstract

**Purpose:** This study discusses the importance of public legal awareness in increasing the competitiveness of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the digital era in Sembulang Village, Rempang District, Galang Island, and Batam City.

**Methodology:** Through a normative juridical approach, this study analyzes the regulations and legal norms related to MSMEs. Using regulatory, historical, and comparative approaches, this study identified the important role of these regulations in facilitating the growth of MSMEs in the digital era.

**Results:** The Indonesian government has taken diverse and comprehensive actions to support the growth of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the digital era. The government seeks to create a conducive environment for MSMEs to innovate and compete in the digital economy through digital infrastructure policies, tax incentives, personal data protection, regulatory simplification, cooperation with technology companies, access to digital financing, and digital training. With an inclusive approach and strong support, MSMEs have a greater opportunity to utilize digital technology, expand market reach, and significantly contribute to Indonesia's economic growth in this digital era. Deep understanding of types of standard certificates.

**Keywords:** Legal Awareness, MSMEs, Digital Age.

**How to Cite:** Prasetyasari, C., Suwalla, N., Lubis, I. H., Andriani, A. R., Delviane, A., Sitohang, C. P., Andriani, T. P., Markis, M., Istighfari, I., Gaol, F. L. (2023). Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Digital pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 19-25.

## 1. Pendahuluan

Dalam menghadapi gelombang perubahan yang semakin cepat menuju era digitalisasi, peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK) dalam perekonomian Indonesia semakin menjadi sorotan. Di tengah revolusi teknologi yang melanda hampir seluruh aspek kehidupan, UMK menjadi elemen vital dalam menjaga keseimbangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Tanjung, 2017). Dalam

konteks ini, wilayah Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW. 004, yang terletak di Kelurahan Sembulang, Kecamatan Rempang Pulau Galang, Kota Batam, menonjol sebagai pusat potensi pertumbuhan dalam era digital yang penuh tantangan. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peran sentral dalam membentuk dasar yang kokoh untuk mengatasi tantangan serta meraih peluang yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK) di era digital yang terus berkembang pesat (Fahmi, Trisulo, & Kusumawati, 2023). Pada intinya, peraturan ini menjadi pijakan penting bagi UMK dalam mengelola perubahan kompleks di tengah arus digitalisasi yang mempengaruhi seluruh aspek bisnis. Pasal 37 dari peraturan ini secara tegas menegaskan bahwa UMK harus memiliki perizinan usaha sebagai landasan legalitas dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Perizinan ini bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan landasan yang menghubungkan UMK dengan kerangka regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Persyaratan kepatuhan ini juga mencakup komitmen UMK dalam mematuhi peraturan dan memberikan keyakinan kepada konsumen serta mitra bisnis tentang kualitas dan kesempurnaan (Sukardi, Nurahman, & Muhadi, 2022).

Namun, keterikatan dengan regulasi penyelesaian tidaklah hanya sebatas administratif. Pemahaman yang mendalam tentang peraturan ini mengungkapkan yang jauh lebih besar. Pertama, pemahaman tentang jenis badan usaha yang sesuai menjadi landasan dalam membangun struktur hukum yang tepat. Menentukan apakah akan berbentuk PT Perorangan, PT Persekutuan Modal, koperasi, atau badan usaha lainnya yang mempengaruhi hak dan kewajiban yang terkait dengan kepemilikan, tanggung jawab, dan perlindungan hukum. Selanjutnya, pemahaman mengenai standar sertifikat bagi produk pangan yang dihasilkan menjadi elemen krusial dalam pengembangan UMK (Oktaviani & Herawaty, 2022). Berada dalam era digital berarti eksposur produk lebih luas, sehingga penting bagi UMK untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan kualitas. Kualitas produk bukanlah lagi pilihan, tetapi menjadi prasyarat bagi daya saing dan kepercayaan konsumen. Kehadiran peraturan ini juga membantu mencegah persaingan yang tidak sehat dan pelanggaran regulasi. Dengan memiliki lisensi dan sertifikat yang sesuai, UMK dapat beroperasi dalam lingkungan bisnis yang lebih teratur, mengurangi risiko pelanggaran hukum, serta mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang adil. Dalam menghadapi era digital, di mana akses informasi sangat mudah dan keterbukaan dihargai, kualitas dan kepatuhan terhadap regulasi memiliki dampak yang lebih besar dari sebelumnya.

Pemahaman mendalam tentang Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mencakup lebih dari sekadar kepatuhan, tetapi juga tentang bagaimana UMK dapat mengoptimalkan peluang di era digital. Dengan memiliki dasar hukum yang kuat dan pemahaman yang mendalam, UMK dapat membuka pintu untuk pertumbuhan berkelanjutan, inovasi, dan menjaga daya saing di pasar global yang semakin terhubung melalui platform digital. Transformasi ekonomi, perubahan cara kerja, dan interaksi sosial akibat teknologi informasi dan komunikasi mengubah lanskap UMK di Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW. 004. Meskipun terdapat peluang dalam ekonomi digital besar, UMK dihadapkan pada tantangan kompleks seperti adaptasi teknologi, inovasi, dan persaingan global. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang aturan hukum dan regulasi menjadi krusial untuk mendukung UMK menghadapi perubahan ini. Peran UMKM mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengedepankan pendirian dan pengembangan usaha berbasis risiko (Herawaty, Andrian, & Oktaviani, 2022). Kemudahan dalam perizinan dan legalitas usaha yang disediakan oleh Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko membantu UMKM mendapatkan izin dan menjalankan usaha dengan lebih mudah. Namun, kesempatan yang dihadapi UMKM juga datang dengan tantangan. Kurangnya pengetahuan teknologi, keterbatasan sumber daya, dan persaingan dengan bisnis yang berpengalaman dalam teknologi digital merupakan beberapa kendala yang perlu diatasi. Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menjadi landasan hukum yang memberikan arah, perlindungan, dan akses dukungan bagi UMKM (Arliman, 2017).

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai pemahaman mendalam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menjadi kunci sukses bagi UMK di Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW. 004. Pemahaman ini bukan hanya tentang regulasi, tetapi juga tentang mengadaptasi teknologi, inovasi,

dan menciptakan daya saing yang kokoh dalam pasar digital yang semakin terhubung dan kompetitif. Melalui pemahaman ini, UMKM dapat menjaga usaha, membangun, dan berkembang di era digital yang penuh tantangan dan peluang.

## **2. Metode**

Pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan yuridis normatif adalah usaha memahami dan menganalisis aspek hukum terkait isu sosial dan ekonomi. Metode ini fokus analisis pada regulasi dan norma-norma hukum terkait permasalahan tersebut. Penelitian ini fokus pada Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk perekonomian daerah. Pendekatan yang digunakan meliputi analisis teks peraturan, pendekatan peraturan-undangan, historis, dan perbandingan. Pertama, analisis yuridis normatif mengidentifikasi norma hukum dalam peraturan dan penerapannya dalam perekonomian daerah. Kedua, pendekatan peraturan-undangan mencari peraturan terkait yang memberikan konteks hukum. Ketiga, pendekatan historis mengungkap latar belakang dan tujuan peraturan berdasarkan perkembangan hukum. Keempat, pendekatan membandingkan peraturan serupa global untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan serta memberi saran (Muhaimin, Husni, & PS, 2021).

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### ***3.1 Pengaturan Hukum Terkait Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Digital***

Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era digital merupakan suatu isu yang krusial bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Seiring dengan kemajuan teknologi dan transformasi digital, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur hukum dan kebijakan guna mendukung pertumbuhan dan daya saing UMKM di era ini. Salah satu langkah yang diambil adalah pengembangan infrastruktur digital dan akses internet yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia (Ardiyansyah, Fahrizal, & Solida, 2022). Dengan konektivitas yang lebih baik, UMKM dapat mengakses pasar yang lebih luas, menjual produk secara online, dan berpartisipasi dalam platform perdagangan digital. Selain itu, pemerintah juga telah mendorong pelatihan dan pendidikan digital bagi pelaku UMKM, sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan lebih efektif.

Dalam hal pengaturan hukum, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM di era digital. Ini termasuk kebijakan perpajakan yang lebih bersahabat, seperti pembebasan pajak untuk UMKM dengan omset tertentu yang beroperasi secara online. Selain itu, ada upaya untuk mengurangi birokrasi dengan mempermudah proses perizinan dan regulasi yang berlaku bagi UMKM. Pemerintah juga telah merumuskan undang-undang perlindungan data pribadi untuk menjaga informasi pelanggan UMKM yang diolah secara digital. Ini penting untuk membangun kepercayaan pelanggan dalam bertransaksi secara online (Hasan, Haliah, & Fahdal, 2022). Di era digital, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan serangkaian kebijakan untuk mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pertama-tama, pemerintah fokus pada peningkatan akses infrastruktur digital dengan memperluas jangkauan internet dan teknologi komunikasi di seluruh negeri. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa UMKM di berbagai wilayah dapat terhubung dengan baik dan mengakses peluang digital. Selanjutnya, kebijakan perpajakan yang menguntungkan UMKM menjadi fokus penting. Pemerintah memberikan insentif perpajakan seperti pembebasan atau pengurangan pajak untuk UMKM dengan omset tertentu yang beroperasi secara digital. Langkah ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan UMKM di dunia digital tanpa memberikan beban pajak yang berlebihan.

Dalam rangka mendorong transaksi yang aman dan privasi pelanggan, pemerintah juga telah menerapkan undang-undang perlindungan data pribadi. Kebijakan ini mengatur bagaimana UMKM harus mengelola dan melindungi data pelanggan yang diperoleh dari operasi digital mereka, sehingga membangun kepercayaan konsumen dalam berinteraksi dengan UMKM secara online. Pemerintah juga mengambil langkah untuk menyederhanakan proses perizinan dan regulasi yang berlaku bagi UMKM. Ini mencakup penggunaan platform digital untuk mendapatkan izin usaha atau proses perizinan lainnya (Hesti, Hapsari, Ainita, & Satria, 2023). Tujuan dari kebijakan ini adalah mengurangi birokrasi yang

berlebihan dan mempermudah UMKM dalam memulai dan mengembangkan usaha mereka. Kerja sama antara UMKM dan perusahaan teknologi besar juga didukung oleh kebijakan yang jelas. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi perusahaan teknologi untuk berkolaborasi dengan UMKM, seperti memberikan akses ke platform digital yang lebih luas atau mendukung inovasi produk dan layanan. Tak kalah penting, pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan dan fintech untuk memfasilitasi akses pembiayaan digital bagi UMKM. Ini dapat melibatkan pengembangan platform peer-to-peer lending atau solusi fintech lainnya yang memungkinkan UMKM mendapatkan modal usaha dengan lebih mudah. Dalam rangka mendukung pelatihan dan pendidikan digital, pemerintah juga dapat mengadopsi program-program pelatihan khusus yang membantu UMKM memahami dan memanfaatkan teknologi digital dengan lebih baik. Semua kebijakan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM di era digital, memastikan bahwa UMKM dapat tetap bersaing dan berkembang dalam ekonomi yang semakin digital ini (Fitriani, 2022).

Dalam rangka mendorong kolaborasi antara UMKM dan perusahaan teknologi besar, pemerintah juga dapat membentuk kerangka kerja yang mengatur kemitraan tersebut, memastikan bahwa UMKM mendapatkan manfaat yang adil dari ekosistem digital. Selain itu, pendekatan inklusif juga diambil dengan melibatkan lembaga keuangan untuk mendukung UMKM dalam mengakses pembiayaan digital. Ini dapat melibatkan pengembangan *platform peer-to-peer lending* atau kerjasama dengan *fintech* untuk memberikan akses yang lebih mudah terhadap modal usaha. Secara keseluruhan, pengaturan hukum terkait peningkatan daya saing UMKM di era digital di Indonesia melibatkan berbagai aspek, termasuk pengembangan infrastruktur digital, kebijakan perpajakan, perlindungan data, pengurangan birokrasi, kerja sama dengan perusahaan teknologi, dan inklusi keuangan. Langkah-langkah ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan inovasi UMKM, serta mendorong ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

### ***3.2 Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Digital Pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam***

Pentingnya Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Daya Saing UMK di Era Digital Di tengah laju perkembangan teknologi dan transformasi digital yang mencakup hampir seluruh aspek kehidupan, sektor usaha juga tak luput dari dampaknya. Era digital telah mengubah cara UMKM beroperasi, berinteraksi dengan konsumen, dan bersaing di pasar global. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki relevansi yang sangat penting untuk memastikan kelangsungan dan peningkatan daya saing UMK di era digital (Puspita, 2023). “Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif diberikan oleh pemerintah guna memberikan perlindungan terkait kepentingan konsumen sebagai pengguna atas produk yang dihasilkan oleh UMKM. Perlindungan hukum preventif yang diperoleh dari pemerintah berupa diwajibkan bagi para pengusaha UMKM untuk melengkapi hasil produksinya dengan sertifikat standar sebagaimana telah diatur dalam Pasal 37 Ayat (3) PP No. 7 Tahun 2021 ttg Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dan perlindungan hukum represif berupa sanksi yang akan diberikan kepada pelaku usaha UMKM apabila dalam melakukan kegiatan usahanya tidak sesuai atau adanya pelanggaran dalam melakukan aktivitas usahanya yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang telah mengatur (Ula, Winarno, & Ariesta, 2022).

Pentingnya pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sangat relevan dalam meningkatkan daya saing UMKM di era digital, khususnya di wilayah Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW. 004 Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. Analisis berikut membahas mengapa pemahaman terhadap peraturan ini penting dalam konteks yang diberikan:

1. Perlindungan Konsumen dan Kualitas Produk UMKM: Pemahaman tentang persyaratan sertifikat standar yang diatur dalam Pasal 37 Ayat (3) PP No. 7 Tahun 2021 penting agar UMKM dapat mematuhi ketentuan kualitas produk yang dihasilkan. Ini akan memberikan perlindungan kepada konsumen sebagai pengguna produk UMKM. Dengan pemahaman ini, UMKM dapat meningkatkan kualitas produk mereka, mendapatkan sertifikat standar, dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas, aman, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen.
2. Pencegahan Pelanggaran Hukum: Pemahaman terhadap peraturan ini membantu UMKM untuk memahami batasan dan aturan dalam menjalankan usaha. Dengan mengetahui kewajiban-kewajiban yang diatur oleh peraturan ini, UMKM dapat mencegah melakukan kegiatan usaha yang melanggar hukum dan menghindari potensi sanksi atau pelanggaran yang dapat merugikan usaha mereka.
3. Meningkatkan Reputasi dan Kepercayaan: UMKM yang mematuhi peraturan dan mengikuti standar yang ditetapkan akan memiliki reputasi yang lebih baik di mata konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Pemahaman terhadap peraturan ini membantu UMKM untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap produk mereka, sehingga meningkatkan daya saing dan pangsa pasar di era digital.
4. Penerapan Teknologi dan Inovasi: Era digital menuntut UMKM untuk beradaptasi dengan teknologi dan inovasi. Pemahaman terhadap peraturan ini memungkinkan UMKM untuk mengembangkan inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan persyaratan hukum. Dengan demikian, UMKM dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis mereka.
5. Peningkatan Keberlanjutan Bisnis: Dengan mematuhi peraturan, UMKM dapat menghindari risiko hukum dan permasalahan hukum yang dapat mengancam kelangsungan bisnis. Pemahaman yang baik terhadap peraturan akan membantu UMKM untuk mengelola risiko dengan lebih baik dan menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang.

Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sangat penting dalam mendukung UMKM di wilayah Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW. 004 Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam agar dapat berkompetisi secara efektif di era digital dan memastikan keinginan serta pertumbuhan bisnis mereka. Pemahaman mendalam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 merupakan faktor krusial dalam meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK) di era digital. Di wilayah Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW. 004, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Rempang Pulau Galang, Kota Batam, pemahaman ini akan memungkinkan UMK untuk lebih adaptif terhadap perubahan dan mampu memanfaatkan peluang digital dengan lebih efektif. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya penguatan pemahaman terhadap peraturan tersebut melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing UMK di tingkat lokal maupun global.

“Sertifikat Standar pembayaran bagi aktivitas usaha dengan basis risiko menengah rendah. untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh UMKM dengan basis risiko menengah baik menengah rendah ataupun menengah tinggi, dan basis risiko tinggi selain Nomor Induk berusaha, diwajibkan pula memiliki sertifikat standar sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Perundang-Undangan. Sertifikat Standar diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemda yang menyelesaikannya. Pada pembahasan ini, penulis berfokus pada produk pangan yang dihasilkan oleh UMKM. adapun jenis-jenis sertifikat standar produk pangan antara lain:

- 1) Nomor SPP-IRT 2. Izin Edar BPOM MD
- 2) HACCP
- 3) Halal
- 4) Sertifikat Laik Hygiene
- 5) Sanitasi Jasaboga (SLHSJ)
- 6) GMP (*Good Manufacturing Practices*) atau CPOOB (Cara Pengolahan Produk Olahan yang Baik) (Ula et al., 2022).

Pemahaman mendalam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sangat penting dalam meningkatkan daya saing UMK di era digital, terutama di wilayah Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW. 004 Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. Analisis berikut membahas mengapa pemahaman yang baik terhadap peraturan ini penting dalam konteks pengetahuan terhadap sertifikat Standar yang diberikan:

1. **Kualitas Produk dan Kepercayaan Konsumen:** Pemahaman tentang keharusan memiliki sertifikat standar, terutama untuk produk pangan, merupakan langkah kritis dalam menjaga kualitas produk UMKM. Sertifikat seperti Nomor SPP-IRT, Izin Edar BPOM MD, HACCP, Halal, dan lainnya, menunjukkan bahwa produk UMKM telah melewati standar dan pengawasan yang ketat. Hal ini akan membangun kepercayaan konsumen terhadap produk, terutama di era digital di mana informasi mudah diakses.
2. **Kepatuhan Hukum dan Penghindaran Risiko:** Pemahaman mengenai kewajiban memiliki sertifikat standar juga berarti memahami pentingnya kepatuhan hukum. Dengan memiliki sertifikat yang sesuai dengan jenis produk pangan yang dihasilkan, UMKM dapat menghindari legal dan sanksi yang mungkin timbul jika produk tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan.
3. **Akses ke Pasar yang Lebih Luas:** Di era digital, pasar tidak lagi terbatas pada wilayah geografis tertentu. Pemahaman tentang sertifikat standar akan membantu UMKM untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk menjual produknya di berbagai platform online, pasar luar negeri, atau kerja sama bisnis lainnya.
4. **Keberlanjutan Usaha dan Pertumbuhan:** Memiliki sertifikat standar juga dapat memperkuat posisi UMKM dalam jaringan bisnis. Keberlanjutan usaha dan pertumbuhan akan lebih mudah dicapai karena kepatuhan terhadap standar yang berlaku dapat membuka peluang kerja sama dengan perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
5. **Peningkatan Reputasi dan Branding:** Pemahaman yang baik tentang sertifikat standar dan penerapannya akan meningkatkan reputasi UMKM di mata konsumen dan pelaku bisnis lainnya. Ini dapat membantu dalam membangun citra merek yang kuat, yang sangat penting di era digital yang penuh dengan informasi dan pilihan.
6. **Adaptasi Teknologi dan Inovasi:** Pemahaman tentang persyaratan sertifikat standar juga relevan dalam aspek teknologi dan inovasi. UMKM yang bergerak di bidang pangan dapat menggabungkan teknologi baru seperti sensor, pengawasan otomatis, atau metode produksi inovatif dalam proses mereka, namun tetap memenuhi standar keamanan dan kualitas yang diatur oleh peraturan.

Pemahaman yang mendalam terhadap jenis-jenis sertifikat standar dan pentingnya memiliki sertifikat ini sesuai dengan jenis produk pangan yang dihasilkan UMKM, seperti Nomor SPP-IRT, Izin Edar BPOM MD, HACCP, Halal, Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga (SLHSJ), dan GMP atau CPPOB, akan memberikan manfaat jangka panjang bagi UMKM di Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW. 004 Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. Dengan pemahaman yang baik, UMKM dapat mengoptimalkan potensi di era digital, menciptakan produk yang lebih berkualitas, dan bersaing secara efektif dalam pasar yang semakin kompetitif.

#### **4. Kesimpulan**

Secara keseluruhan, pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan yang beragam dan komprehensif untuk mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era digital. Melalui kebijakan infrastruktur digital, insentif perpajakan, perlindungan data pribadi, penyederhanaan regulasi, kerja sama dengan perusahaan teknologi, akses pembiayaan digital, dan pelatihan digital, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM untuk berinovasi dan bersaing dalam ekonomi digital. Dengan pendekatan yang inklusif dan dukungan yang kokoh, UMKM memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memanfaatkan teknologi digital, memperluas jangkauan pasar, dan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di era digital ini. Pemahaman mendalam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM menjadi kunci penting bagi UMKM di Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW. 004 Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam dalam menghadapi tantangan era digital. Memahami jenis sertifikat standar untuk produk pangan seperti

Nomor SPP-IRT, Izin Edar BPOM MD, HACCP, Halal, Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga (SLHSJ), dan GMP atau CPPOB akan membantu UMKM menjaga kualitas produk, memenuhi regulasi, dan bersaing secara efektif di pasar yang semakin kompetitif, serta memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

## Referensi

- Ardiyansyah, A., Fahrizal, F., & Solida, A. (2022). Komunikasi Pemasaran Terpadu UMKM Area Wisata Tugu Keris Siginjai di Era New Normal. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 328-332.
- Arliman, L. (2017). Perlindungan hukum UMKM dari eksploitasi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 387-402.
- Fahmi, A., Trisulo, T., & Kusumawati, R. (2023). Pendampingan Pengembangan Kapasitas Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 2(3), 147-155. doi:10.35912/jnm.v2i3.1892
- Fitriani, A. (2022). Hukum dan Kesadaran Masyarakat: Strategi Pemberdayaan UMKM di Era Digital. *Genta Publishing, Bandung*, 2022.
- Hasan, H., Haliah, H., & Fahdal, M. A. (2022). Pemberdayaan Masyarakat UMKM Sulawesi dalam Implementasi Digitalisasi UMKM. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 43-50. doi:10.35912/yumary.v3i1.1225
- Herawaty, V., Andrian, P. D., & Oktaviani, A. A. (2022). Peningkatan Kompetensi Dasar Akuntansi Kelompok UMKM (Kompeten) di Bekasi. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 109-118. doi:10.35912/yumary.v2i2.937
- Hesti, Y., Hapsari, R. A., Ainita, O., & Satria, I. (2023). Penguatan UMKM Kolektif Melalui Pemberdayaan Perempuan di Kampung Nelayan Cungkeng Teluk Betung Timur Bandar Lampung Melalui Pembuatan Kerupuk Cumi. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 2(1), 53-58.
- Muhaimin, M., Husni, L., & PS, L. W. (2021). Permasalahan Hukum Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Konversi Bank Ntb Syariah. *Prosiding SAINTTEK*, 3, 387-397.
- Oktaviani, A., & Herawaty, V. (2022). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Wirausaha UMKM di Tegal Alur, Jakarta Barat. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 13-21. doi:10.35912/yumary.v3i1.1271
- Puspita, D. A. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Kulit Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan di Era Digital*. IAIN PONOROGO.
- Sukardi, D. H., Nurahman, D., & Muhadi, M. (2022). OPTIMALISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021 DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI UMKM. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 1(1), 52-56.
- Tanjung, M. A. (2017). Koperasi dan UMKM sebagai fondasi perekonomian Indonesia.
- Ula, Z., Winarno, R., & Ariesta, W. (2022). Tinjauan Yuridis Pp No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Umkm Yang Tidak Memiliki Sertifikat Standar Produk. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(2).